

**LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH: EKSISTENSI DAN
AKSESIBILITASNYA BAGI PEMBIAYAAN USAHATANI
DI SUMATERA BARAT
(Studi Kasus: Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT))**

Widya Fitriana

Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat
e-mail : widyafitriana66@gmail.com

ABSTRACT

Farm financing is one of the factors facilitating the development of agriculture which allow farmers to expand the scale of farming and adopt new technologies. Unfortunately, a number of financial institutions often perceive farmers as "unbankable poor" that is costly to finance. KJKS BMT is one financial institution that is initiated by the government of West Sumatra's mission of poverty reduction in rural areas in particular to improve the access of small farmers to credit. So this study aims to identify and analyze the existence and accessibility of financing KJKS BMT in serving the financing of farming in West Sumatra. This study was conducted in a multi-stage random sampling, cities that randomly selected are Kota Padang and Bukittinggi, and then for each city, one KJKS BMT is also randomly selected. Primary data were collected by interviewing 60 respondent's farmers. This research uses grounded research methods and data analysis in qualitative descriptive. Period of observation data for 2 years ie 2012-2014. Existence of KJKS BMT to finance farming measured by used five indicator namely a) The number of customers, b) The number of farmer customers, c) credit share for the agricultural, d) The number of farm financing and e) Development of BMT's human resources. Furthermore accessibility is measured using six indicators, namely: (a) access to information, (b) access to loan procedure, (c) access to the maximum limit, (d) access to the time of disbursement, (e) access to loan repayment, and (f) facilitation of access to financing. The results show that (1) although the existence of KJKS BMT start respected by rural communities, and even show a positive growth, but the credit share given by KJKS BMT to farm credit is still very small compared to another sectors (like trade and manufactures) which are less than 5%, Even though the level of customer growth of farmers during the past two years is reach 75%, higher than the growth of total customer (2) Accessibility of KJKS BMT to farm financing overall is good, although there are several factor that must be addressed like the availability of information, the number of loan, monitoring and loan supervision.

Keywords: *existence, accessibility, syariah based financing.*

PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis perbankan di Indonesia saat ini mulai diinisiasi oleh sistem keuangan syariah. Adanya tuntutan masyarakat terhadap jasa perbankan yang bebas riba menjadikan pertumbuhan perbankan syariah semakin meningkat. Hal ini diperkuat dengan keberadaan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Salah satu lembaga keuangan syariah yang dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan pedesaan adalah KJKS BMT (Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil)

Pembentukan dan penumbuhan KJKS BMT di Sumatera Barat sebagai tindak lanjut dari keputusan bersama 3 menteri (Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Koperasi) Gubernur Bank Indonesia No. 351.1/KMK.010/2009, No 900-639A/2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009. Di Kota Padang sendiri pengembangannya diatur dalam Perwako No. 15 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa penyaluran kredit mikro kecil yang dikelola Pokja ditransformasikan kepada KJKS BMT kelurahan yang berbadan hukum. Tahun 2011 Kota Padang telah memiliki 59 unit KJKS BMT yang tersebar di 7 kecamatan dan 50 kelurahan.

Berbagai jenis pembiayaan di sektor pertanian, baik yang berasal dari perbankan konvensional maupun syariah telah diaplikasikan pada masyarakat. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut diakui masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan, tidak hanya di pihak bank sebagai penyedia pinjaman tapi juga di pihak petani sebagai penerima pinjaman.

Di sisi lain, walaupun pemerintah secara nasional telah banyak mengintroduksi berbagai skim pembiayaan untuk sektor pertanian, namun efektivitas dan keberlanjutannya serta peranannya dalam mendorong pengembangan pertanian, masih jauh dari yang diharapkan. Pada kenyataannya, secara mikro sebagian pelaku usaha pertanian masih memiliki tingkat aksesibilitas yang rendah terhadap sumber-sumber permodalan. Hal ini terkait dengan berbagai faktor diantaranya tidak dapat menyediakan agunan fisik ataupun pihak-pihak lain yang dapat menjamin di samping biaya transaksi pinjaman yang dinilai sangat tinggi.

Keberadaan LKM KJKS BMT diharapkan mampu menjadi jawaban atas lemahnya akses petani terhadap jasa keuangan, selain itu pembiayaan berdasarkan syariah yang ditawarkan diharapkan mampu menjawab dinamika dan tuntutan masyarakat terhadap jasa keuangan yang bebas riba. Hal ini dirasakan sesuai dengan kondisi usaha pertanian yang rentan resiko karna besarnya ketergantungan usaha ini dengan factor alam. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi petani karena dalam KJKS BMT menganut prinsip bagi hasil. Namun sejauhmanakah anggapan ini berlaku dalam kondisi riilnya? Inilah yang menjadi alasan mendasar dilakukannya penelitian ini.

TUJUAN PENELITIAN

Untuk itu penelitian ini dirancang untuk menjawab sejumlah tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi keberadaan/eksistensi KJKS BMT dalam pembiayaan usahatani di Sumatera Barat

2. Menganalisis aksesibilitas pembiayaan KJKS BMT bagi petani.

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang cukup tentang eksistensi dan aksesibilitas petani terhadap pembiayaan dari KJKS BMT sehingga dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk pengembangan KJKS BMT kedepan dalam mengemban misi mengentaskan kemiskinan di tingkat kelurahan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Akses terhadap kredit mikro pertanian merupakan tantangan penting untuk petani kecil dibanyak negara berkembang (Anang, 2015). Di Indonesia, hal tersebut sebenarnya sudah dipahami pemerintah dengan menyediakan paket kredit usahatani, dan beragam skim kredit yang diperuntukan bagi petani kecil dan pelaku usaha mikro. Namun kenyataan menunjukkan bahwa minat dan akses petani kecil terhadap kredit perbankan masih kurang. Akibatnya, petani kecil cenderung menjadi kelompok marjinal di pasar kredit di banyak daerah. Padahal Nouman *et al.* (2013) menyatakan bahwa kredit pertanian dapat mempercepat modernisasi pertanian dan pengembangan ekonomi, hal ini juga menciptakan dan mempertahankan aliran input yang memadai sehingga meningkatkan efisiensi dalam produksi pertanian.

Belajar dari pengalaman Muhammad Yunus (pemenang hadiah Nobel tahun 2006) dalam mengelola *Grameen Bank* di Bangladesh mengungkapkan bahwa "*the poor are bankable if the right lending mechanism is used*". Masyarakat kecil seperti petani pada dasarnya layak untuk diberikan pinjaman bank bila mekanisme perbankan yang diberlakukan sesuai dengan karakteristik usaha pertanian. Sejalan dengan itu Mardikanto (2007) menemukan bahwa bagi petani kecil, yang dikehendaki bukanlah kredit dengan tingkat bunga murah, melainkan kredit dengan prosedur yang sederhana dan mudah. Tuntutan petani seperti inilah yang seringkali belum

bisa dipenuhi oleh lembaga pembiayaan formal, yang pada akhirnya menyebabkan akses mereka terhadap kredit perbankan menjadi sangat rendah.

Perkembangan bisnis perbankan dewasa ini, menghadirkan salah satu alternatif sumber pembiayaan yang berbasis syariah yakni KJKS BMT. Lembaga ini diprogram untuk mengemban misi pengentasan kemiskinan di pedesaan. Menurut Suratno (2007) ada sejumlah keunggulan BMT dibandingkan bank konvensional yakni; 1) berlandaskan syariah, 2) kegiatan operasinya berdasarkan prinsip efisiensi, keadilan dan kebersamaan, 3) memiliki ikatan emosional keagamaan yang kuat antar lembaga dan nasabahnya, sehingga muncul kebersamaan dalam berbagi resiko dan keuntungan secara adil dan jujur, 4) Adanya fasilitas pembiayaan yang lebih mengutamakan kelayakan usaha ketimbang ketersediaan jaminan, 5) penerapan sistem bagi hasil memberikan kenyamanan psikologis bagi nasabah dalam berusaha tanpa dihantui resiko kegagalan yang buruk.

Menurut Claessens (2006) dalam Kostov (2015), akses terhadap kredit perbankan dapat diukur dari 4 indikator yakni : (a) *availability*, (b) *reliability*, (c) *flexibility*, dan (d) *continuity of access to financial services*.

Hasil penelitian Anang (2015) mengungkapkan bahwa akses petani terhadap kredit mikro di Northern Ghana dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berasal dari karakteristik individu petani pedesaan yakni: (a) gender, (b) pendapatan rumah tangga petani, (c) modal petani, (d) adopsi teknologi, (e) *extension contact*, (f) lokasi, dan (g) kesadaran terhadap institusi perbankan. Jadi pada dasarnya akses petani terhadap perbankan dipengaruhi oleh karakteristik individu petani, karakteristik usahatani dan mekanisme/prosedur yang berlaku di perbankan tersebut.

Keberadaan KJKS BMT sebagai lembaga pembiayaan di level kelurahan diharapkan dapat men"dekatkan" hubungan masyarakat dengan lembaga keuangan. Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan akses

masyarakat terhadap pembiayaan usahatani karena mengedepankan prinsip kelayakan usaha ketimbang ketersediaan jaminan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada dua kabupaten/kota yang dipilih secara acak, yakni terpilih Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Pada masing-masing wilayah pengamatan kemudian diambil secara acak masing-masing satu unit usaha KJKS BMT untuk dijadikan sebagai sumber data. Responden penelitian diambil dari nasabah masing-masing BMT sebanyak 30 orang dan nasabah non BMT (dianggap sebagai nasabah potensial) sebanyak 30 orang, Jadi total responden penelitian ini berjumlah 60 orang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *grounded research* dan analisis dengan metode deskriptif kualitatif. Periode data yang diamati adalah 2 (dua) tahun yakni 2013-2014. Data primer dikumpulkan dari petani dengan menggunakan teknik wawancara mendalam. Sejumlah indikator digunakan untuk menjawab tujuan penelitian yakni: tujuan pertama untuk mengidentifikasi keberadaan/eksistensi lembaga keuangan mikro syariah dalam melayani pembiayaan usaha pertanian, maka indikator yang diamati adalah :

1. Perkembangan jumlah nasabah
2. Perkembangan jumlah nasabah petani
3. Perkembangan jumlah pinjaman (*share credit*) untuk sektor pertanian
4. Perkembangan jumlah pembiayaan total
5. Perkembangan SDM/pengurus

Kedua untuk menganalisis aksesibilitas dan realisasi pembiayaan dari lembaga keuangan mikro untuk usaha pertanian, maka indikator yang diamati adalah

1. Akses informasi
2. Kemampuan mengikuti prosedur
3. Volume pagu pinjaman
4. Realisasi pencairan pinjaman.
5. Komposisi jumlah cicilan/waktu pengembalian
6. Pendampingan dan Monitoring

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cikal bakal lahirnya KJKS BMT di-prakarsai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang kemudian mendapat tanggapan dari Wakil Presiden RI saat itu yakni Bapak Habibie mewakili Presiden Soeharto dalam SILAKNAS ICMI di Jakarta 7 Desember 1995 mencanangkan B.M.T sebagai Gerakan Nasional dalam rangka mem-berdayakan masyarakat lapisan bawah, sekaligus meresmikan berdirinya 1000 B.M.T diseluruh Indonesia. Pada tanggal 01 Juli 1999 sudah tercatat 1989 BMT beroperasi di seluruh Indonesia.

Dasar pelaksanaan kegiatan KJKS BMT sendiri mengacu pada keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan usaha KJKS. Kemudian diperkuat dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang Tahun 2014 melalui program pengembangan kelembagaan koperasi.

Pengentasan kemiskinan berbasis ke-lurahan melalui pembentukan Kelompok Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT), merupakan salah satu program prioritas di Kota Padang dan Bukittinggi dalam rangka pengurangan jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Sebagai sebuah lembaga keuangan yang mengemban misi pengentasan kemiskinan di pedesaan, maka pemerintah telah menggulirkan se-

jumlah dana pembiayaan untuk kelompok masyarakat miskin melalui KJKS BMT.

Berdasarkan evaluasi hingga tahun 2014, perkembangan KJKS BMT di Kota Padang cukup menggembirakan, dimana dari tahun 2010 lalu dengan modal awal sebanyak Rp16,2 Milyar dan tahun 2014 telah berkembang menjadi Rp29,9 Milyar dengan pembiayaan yang disalurkan kepada 11.455 KK miskin dengan nilai pembiayaan Rp84,6 Milyar dan jumlah hasil usaha mencapai Rp758 juta. Sedangkan perkembangan KJKS BMT di Bukittinggi menunjukkan bahwa nilai aset BMT yang semula di stimulan sebesar Rp4,4 miliar, dalam tempo setahun mampu berkembang mencapai Rp8,2 miliar dan mampu menyerap sekitar 6.599 orang tenaga kerja, dengan 600 lebih tenaga lapangan

Untuk melihat eksistensi dan aksesibilitas KJKS BMT bagi pembiayaan usahatani, maka penelitian ini menggunakan petani sebagai responden yang ditetapkan ber-dasarkan *quota sampling* sebanyak 60 responden, terdiri dari 2 kelompok yakni 30 orang responden nasabah KJKS BMT dan 30 orang responden nasabah potensial. Respon-den diambil secara *purposive* dimana responden adalah petani yang sudah pernah mendapatkan pembiayaan dari KJKS BMT dan/atau petani yang belum pernah men-dapatkan pembiayaan dari KJKS BMT tetapi pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangannya lainnya seperti BPR dan bank komersial.

Tabel 1. Karakteristik Individu Petani Responden pada KJKS BMT di Kota Padang dan Bukittinggi (2014)

No	Profil responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin		
	a. Pria	38	63
	b. Wanita	22	37
2	Usia (<i>age is an important variable in decision making</i>)		
	a. 15-30	8	13
	b. 31-50	42	70
	c. >50	10	17
3	Pendidikan		
	a. Setingkat SD	4	7
	b. Setingkat SLTP	26	43
	c. Setingkat SLTA	28	47
	d. Setingkat PT	2	3

Responden dalam penelitian ini adalah nasabah petani yang mengusahakan berbagai jenis tanaman seperti padi sawah, palawija dan hortikultura. Profil dan karakteristik petani responden dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa secara gender, penerima kredit laki-laki lebih dominan (sebesar 63%) dibandingkan perempuan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Khalid (2003) dan Ololade and Olagunju (2013) yang menemukan bahwa di Nigeria, justru penerima kredit perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki dan perempuan memiliki tingkat pengembalian pinjaman yang lebih baik. Di Sumbar ditemukan bahwa keputusan untuk melakukan pinjaman lebih didominasi oleh laki-laki sedangkan untuk pengelolaan pinjaman itu sendiri kemudian diserahkan kepada perempuan. Tenaga kerja pertanian lebih banyak dilakukan oleh kaum laki-laki, tapi seiring dengan perkembangannya di desa-desa banyak juga kaum perempuan yang terlibat dalam kegiatan pertanian, tidak hanya sekedar membantu suaminya yang seorang petani tetapi juga sekaligus menjadikan pertanian sebagai lapangan pekerjaannya.

Berdasarkan rentang usia responden, kelompok usia muda dan produktif masih mendominasi, dan hanya sebagian kecil (17%) yang berusia lanjut (50 tahun keatas). Ini artinya bahwa berusaha masih menjadi salah satu pilihan pekerjaan yang dilakukan

oleh kelompok usia produktif di kelurahan/pedesaan, dan bila dilihat dari tingkat pendidikan petani responden, 47% berada di tingkat SLTA, dan 3% petani yang berpendidikan sarjana. Hasil penelitian Nikaido (2015) mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan (*farmer's education level*) dan skala usaha merupakan salah satu faktor yang berkorelasi positif terhadap akses masyarakat terhadap jasa keuangan formal di India. Dzadze *et al.* (2012) juga membenarkan bahwa *education level* dan *saving habit* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akses petani pada pembiayaan formal di Ghana. Owuor (2009) mengamati di Kenya petani yang melek huruf dan tingkat pendidikannya memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kemampuan petani untuk mengakses informasi kredit.

Pengalaman berusaha petani responden berkisar antara 6-15 tahun (56%), ini menandakan bahwa bertani sudah menjadi pekerjaan yang sudah dijalankan selama bertahun-tahun dan bahkan sudah menjadi pekerjaan utama bagi masyarakat di pedesaan. Luas lahan yang dikelola beragam, dengan persentase terbesar 0-5 sampai 1 Ha (46%). Kepemilikan lahan yang kecil seringkali menyulitkan mereka untuk melakukan pinjaman ke bank karena agunan yang tidak layak. Studi Nikaido (2015) justru mengungkapkan bahwa kepemilikan lahan yang dapat digunakan sebagai jaminan berkorelasi

Tabel 2. Karakteristik Usahatani (Farm Characteristics) Responden Pada KJKS BMT di Kota Padang dan Kota Bukittinggi (2014)

No	Profil responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Lama berusaha (<i>the years of farming experience</i>)		
	a. <5 tahun	7	12
	b. 6-15 tahun	34	56
	c. > 16 tahun	19	32
2	Jenis komoditi*		
	a. Padi sawah	43	72
	b. Palawija	7	12
	c. Hortikultura	21	35
3	Luas usahatani (<i>size of farming</i>)		
	a. <0,25 Ha	4	7
	b. 0,25-0,5 Ha	19	32
	c. 0,5-1 Ha	28	46
	d. > 1 Ha	9	15

Keterangan : * Setiap responden ada yang menanam lebih dari satu komoditi.

negatif dengan akses terhadap kredit formal. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya transaksi tanah bila digunakan sebagai jaminan ke bank. Sehubungan dengan kecilnya kepemilikan lahan petani secara individu (*farm size*), beberapa studi terkait menjelaskan pentingnya memberikan pinjaman secara kelompok sebagai salah satu pilihan metode pemberian kredit formal untuk masyarakat miskin pedesaan yang tidak dapat menjamin pinjaman individu (Yehuala 2008; Konare 2001; Paxton *et al.*, 2000). Contohnya, petani di Mali yang mensyaratkan perlunya untuk menjadi anggota asosiasi/kelompok desa sebelum mereka dapat mengakses kredit dari bank umum (Konare 2001).

Dilihat dari besarnya jumlah pinjaman yang diterima responden dari KJKS BMT, 73% responden meminjam Rp1-Rp3 juta. Menurut mereka, pinjaman dari BMT belum memenuhi kebutuhan biaya usahatani yang mereka usahakan. Sebagai perbandingan total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi sawah (diluar biaya upah dan jasa pertanian) bisa mencapai Rp7,37 juta, palawija sebesar 4,17 juta dan hortikultura sebesar Rp3,28 juta. Responden petani padi sawah misalnya dengan pembiayaan dari BMT sebesar Rp3 juta hanya mampu menutupi biaya bibit, pupuk, pestisida serta sewa alat/sarana. Sedangkan sewa lahan dan upah tenaga kerja tidak dapat ditutupi padahal jika dilihat dari struktur biaya usahatani, kedua komponen biaya tersebut memiliki persentase yang besar mencapai 70% dari biaya total. Jadi dapat dilihat bahwa bantuan pembiayaan yang mereka terima masih belum mampu menutupi biaya operasional usahatani mereka secara keseluruhan.

Hal ini jugalah yang berdampak terhadap keputusan petani dalam mengalokasikan penggunaan pinjaman. Sebanyak 87% responden menggunakan untuk kebutuhan pembelian input usahatani seperti bibit, pupuk dan pestisida. Sebanyak 37% responden menggunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi keluarga petani. Sedangkan untuk

petani yang tidak memiliki lahan, pinjaman biasanya digunakan untuk membayar sewa lahan dan sisanya untuk pembiayaan usahatani dan kebutuhan keluarganya. Dengan nominal pinjaman berkisar Rp1 - Rp3 juta dapat dibayangkan bagaimana pinjaman tersebut sangat dibutuhkan oleh petani miskin terutama dalam penyediaan input produksi. Ketersediaan kredit tidak hanya dibutuhkan karena rendahnya keswadayaan (*capital formulation*) petani tetapi juga karena karakteristik usaha pertanian yang memiliki jeda waktu antara input dan output produksi (*gestation period*). Hasil penelitian di beberapa negara menunjukkan lemahnya akses petani terhadap kredit formal. Bank Dunia (2007) mengungkapkan hasil survei dari 6.000 rumah tangga yang dilakukan di dua negara India menemukan bahwa terdapat 87% petani yang tidak memiliki akses ke kredit formal dan 71%nya tidak memiliki akses ke rekening tabungan di lembaga keuangan formal, hanya 16% rumah tangga pedesaan di Nepal yang memiliki rekening bank, hal ini menunjukkan lemahnya akses masyarakat terhadap jasa keuangan formal. Demikian pula, hanya 27% dari petani marjinal dan kecil memiliki akses ke sumber formal kredit di Bangladesh (Khalily *et al.*, 2002).

Di Indonesia, khususnya di Sumbar keberadaan KJKS BMT mengemban misi untuk mengentaskan kemiskinan pedesaan khususnya mengatasi persoalan pembiayaan bagi petani kecil dan marjinal. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa responden yang sudah pernah melakukan pinjaman ke KJKS BMT cenderung untuk melakukan pinjaman secara berulang. Hal ini terlihat pada Tabel 3 dimana nasabah yang meminjam 2-3 kali mencapai 67%. Menurut responden alasan yang mendasari mereka melakukan pinjaman ke BMT adalah karena kemudahan prosedur pengajuan. Selain itu letak/lokasinya yang begitu dekat dengan petani yakni di kelurahan dianggap bisa membuat kedekatan tersendiri bagi petani untuk memperoleh dan menggunakan jasa pembiayaan pada lembaga ini. Anang (2015)

Tabel 3. Karakteristik Pinjaman (Loan Characteristics) Petani pada KJKS BMT di Kota Padang dan Bukittinggi (2012-2014)

No	Profil responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Jumlah Pinjaman ke KJKS BMT		
	a. < Rp1,0 juta	2	7
	b. Rp1,0 – 2,0 juta	10	33
	c. Rp2,1 – 3,0 juta	12	40
	d. Rp3,1 – 4,0 juta	1	3
	e. Rp4,1 – 5,0 juta	3	10
	f. > Rp5 juta	2	7
2	Penggunaan Pinjaman**		
	a. Biaya operasional usahatani	26	87
	b. Tambahan biaya hidup keluarga	11	37
	c. Untuk sewa lahan	2	7
	d. Untuk biaya sekolah anak	1	3
	e. Keperluan lain-lain	1	3
3	Frekuensi melakukan pinjaman ke KJKS BMT		
	a. Pertama kali		
	b. 2-3 kali	20	67
	c. 4-5 kali	7	23
	d. > 5 kali	3	10

mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi akses petani terhadap jasa perbankan adalah faktor lokasi.

Salah satu faktor yang ditengarai membuat lemahnya akses petani terhadap lembaga keuangan adalah sistem pembiayaan dan prosedur yang kaku dan berbelit. KJKS BMT dirancang dengan sistem pembiayaan dan prosedur yang sederhana sehingga memudahkan bagi masyarakat pedesaan untuk berhubungan dengan jasa perbankan. Tidak mensyaratkan agunan, tanpa bunga dan sistem pengembalian yang fleksibel menjadi faktor plus pemanfaatan KJKS BMT sebagai alternatif pembiayaan bagi petani di pedesaan.

EKSISTENSI KJKS BMT DALAM PEMBIAYAAN USAHATANI

Pemaknaan secara umum, eksistensi berarti keberadaan, tetapi eksistensi dalam konteks penelitian ini tidak hanya dimaknai sebagai sebuah keberadaan secara umum tetapi lebih kepada aktualisasi (keberadaan actual) di tengah masyarakat, khususnya petani.

Beberapa riset terdahulu seperti Nikaido (2015); Dzadze *et al.* (2012) dan Kostov (2015),

menggunakan indikator pertumbuhan dan perkembangan untuk mengukur eksistensi lembaga keuangan formal. Sementara Ismaniyati (2004) mengukur eksistensi BMT dari fungsi yang dijalankannya dan payung hukum yang menaunginya. Berdasarkan penelitian terdahulu maka penelitian ini melihat eksistensi KJKS BMT terhadap pembiayaan usahatani, dengan menggunakan 5 indikator pada 2 tahun periode pengamatan (2012-2014) yakni sebagai berikut:

- a. Perkembangan jumlah nasabah
- b. Perkembangan jumlah nasabah di sektor pertanian
- c. Perkembangan jumlah pinjaman (*share credit*) untuk sektor pertanian
- d. Perkembangan jumlah pembiayaan usahatani padi KJKS-BMT
- e. Perkembangan SDM/pengurus BMT

Berikut hasil pengamatan atas kelima indikator tersebut seperti yang terlihat pada Tabel 4.

Eksistensi KJKS BMT di kelurahan mulai dirasakan oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif pembiayaan untuk usaha mereka termasuk pembiayaan usahatani. Perkembangan jumlah nasabah KJKS BMT selama tahun pengamatan mengalami peningkatan

Tabel 4. Keberadaan/Eksistensi KJKS BMT terhadap Pembiayaan Usahatani (kondisi rata-rata 2 tahun terakhir)

Indikator	Kondisi 2012	Kondisi 2014	Perkembangan (%)
Perkembangan jumlah total nasabah (orang)	233	320	37
Perkembangan total nasabah petani (orang)	20	35	75
Perkembangan <i>share credit</i> untuk pertanian (%)	2	4,7	1,35
Perkembangan total pembiayaan (Rp)	665.448.950	1.043.073.279	56
Perkembangan SDM kepengurusan (orang)	4	6	50

*Hasil rata-rata pada pengamatan di kedua KJKS BMT

sebesar 37%, artinya bahwa keberadaan KJKS BMT mulai tumbuh dan berkembang di-tengah masyarakat. Eksistensinya mulai diminati petani sebagai alternatif pembiayaan usahatani.

Perkembangan jumlah nasabah petani di KJKS BMT cukup tinggi yakni rata-rata mencapai 75%, angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan jumlah nasabah secara keseluruhan. Ini menandakan bahwa petani mulai mengakses BMT untuk pembiayaan usahatani mereka, walaupun jika dilihat dari *credit share* untuk pertanian di KJKS BMT masih sangat rendah yakni kurang dari 5%. Kondisi ini tentu menyedihkan mengingat bahwa usaha pertanian belum menjadi prioritas utama bagi KJKS BMT untuk dibiayai dibandingkan sektor lain seperti perdagangan. Namun dengan melihat perkembangan jumlah nasabah petani yang cukup tinggi (75%) terutama kondisi 2 (dua) tahun terakhir, ini bisa dijadikan pertimbangan dan dasar yang kuat bagi pengurus KJKS BMT untuk memperbesar *credit share* untuk pembiayaan usahatani. Selama ini *credit share* terbesar masih didominasi untuk pembiayaan usaha perdagangan dan *home industry*.

Perkembangan total pembiayaan yang dilakukan oleh KJKS BMT selama dua tahun terakhir juga dirasa cukup baik yakni mencapai 56%. Hal ini berbanding lurus dengan perkembangan jumlah nasabah yang juga mengalami peningkatan (37%) sehingga menambah jumlah simpanan anggota.

Dengan bertambahnya jumlah anggota maka kebutuhan untuk penambahan personil kepengurusan juga dirasakan perlu sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik terhadap anggotanya. Kepada pengurus dan pengelola pihak KJKS BMT memberikan honor/penggantian transport/insentif sebesar 16% dari margin bersih/bulannya. Pemberian ini dilakukan bersifat variabel tergantung dari margin bersih setiap bulan, sehingga hal ini bisa mendorong peningkatan kinerja yang lebih baik dari SDM kepengurusan.

Berdasarkan informasi pada Tabel 2 dapat dikatakan bahwa keberadaan/eksistensi KJKS BMT di tengah masyarakat mulai menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Lembaga keuangan ini mampu menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diakses dengan mudah oleh petani, terutama petani kecil yang tidak bisa mendapatkan pembiayaan ke lembaga keuangan formal dikarenakan ketiadaan agunan/jaminan ataupun prosedur pembiayaan yang dirasa rumit dan sulit. Dengan memanfaatkan layanan keuangan di KJKS BMT petani bisa melakukan pinjaman walaupun tidak disertai agunan dengan prosedur yang sederhana cukup melampirkan KTP, KK, pas foto dan rekomendasi dari Lurah setempat. Aturan pengembalian pinjaman yang juga sederhana dan tidak kaku menjadi alasan lain bagi petani untuk mencoba menggunakan pembiayaan pada KJKS BMT, dengan sistem harian mingguan atau bulanan dapat disesuaikan dengan

kemampuan nasabah petani. Sistem pengelolaan berdasarkan prinsip syariah tanpa mengenal bunga memberikan manfaat plus bagi nasabah karena berbagi resiko dan keuntungan dengan pihak pemberi pinjaman. Ini menjadi karakter yang unik pada KJKS BMT yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan lainnya.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka beberapa point penting yang berdampak terhadap eksistensi BMT ditengah masyarakat petani adalah sbb:

- a. Prosedur pengajuan pinjaman yang sederhana dan tidak membutuhkan agunan/jaminan.
- b. Dasar penilaian pinjaman/kredit tidak berbasis agunan melainkan kelayakan/prospek usaha, pengalaman bertani (*farming experience*) dan *account turnover*.
- c. Pengembalian pinjaman bisa dilakukan secara fleksibel dengan pilihan sistem pembayaran secara harian, mingguan dan bulanan
- d. Sistem pengelolaan pinjaman adalah berbagi resiko dan keuntungan antara petani dan pihak BMT.
- e. Lokasi BMT yang berbasis di level kelurahan lebih mudah dijangkau oleh petani di pedesaan.

AKSESIBILITAS PEMBIAYAAN USAHATANI OLEH KJKS BMT

Aksesibilitas didefinisikan sebagai derajat kemudahan yang dicapai oleh petani dalam menggunakan fasilitas pembiayaan dari KJKS BMT. Claessens (2006) dalam Kostov (2015), mengukur akses terhadap kredit perbankan dari 4 indikator berikut

yakni : (a) *availability*, (b) *reliability*, (c) *flexibility*, dan (d) *continuity of access to financial services*. Sementara Dzadze et al. (2012) mengukur aksesibilitas petani terhadap kredit formal berdasarkan 2 faktor yakni (a) karakteristik individu petani meliputi: gender, tingkat pendidikan petani, kunjungan penyuluh, dan kemampuan menabung petani, dan (2) faktor sosio ekonomi. Hussein (2007) menjelaskan bahwa pendidikan, informasi kredit dan penyuluhan dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan petani, termasuk kemampuan untuk membandingkan pro dan kontra dalam menentukan pilihan kredit yang akan diambilnya.

Berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu, maka aksesibilitas dalam konteks penelitian ini diukur dengan mengadopsi indikator Claessens (2006) dan Dzadze et al. (2012) dan mengembangkannya menjadi 6 indikator sebagai berikut yakni: (a) akses informasi, (b) akses terhadap prosedur pinjaman, (c) akses terhadap pagu pinjaman, (d) akses terhadap waktu pencairan, (e) akses terhadap waktu pengembalian pinjaman, dan (f) akses terhadap pendampingan pembiayaan.

a. Akses informasi

Mencakup pengetahuan tentang informasi pembiayaan (*availability of credit information*) serta prosedur pengajuan pinjaman pada KJKS BMT. Akses terhadap informasi dan prosedur pinjaman diukur dengan menggunakan Skala Likert dengan indikator baik, kurang baik dan tidak baik, seperti pada Tabel 5.

Akses informasi petani terhadap jasa pembiayaan pada KJKS BMT 50% nya adalah

Tabel 5. Akses Petani terhadap Informasi Pembiayaan di KJKS BMT

Indikator	Penilaian Indikator	Jumlah (orang)		Persentase (%)
		nasabah	Non nasabah	
Baik	Bila mengetahui informasi sumber pembiayaan dan prosedur pengajuannya	20	10	50
Kurang Baik	Mengetahui informasi sumber pembiayaan tapi tidak tahu prosedur pengajuannya	8	9	28
Tidak baik	Bila tidak mengetahui informasi pembiayaan sama sekali	2	11	22

Tabel 6. Kemampuan Nasabah Membuat Proposal Pengajuan Pinjaman

Indikator	Penilaian Indikator	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Baik	Bila mampu membuat proposal sendiri sesuai dengan standar BMT	19	63
Kurang Baik	Bila hanya mampu membuat proposal sesuai dengan standar BMT jika didampingi orang lain	11	37
Tidak baik	Tidak mampu membuat sendiri dan tidak berusaha minta bantuan orang lain	0	0

baik. Artinya masyarakat mengetahui informasi dan prosedur pinjaman secara lengkap (*symmetric information*). Ada juga responden yang mendapatkan informasi yang tidak sempurna yakni 28% dimana responden mendapatkan informasi keberadaan KJKS BMT dari tempat-tempat publik seperti saat berbelanja ke pasar, arisan atau kegiatan sosial masyarakat lainnya, dari tetangga dan teman atau kerabatnya. Mereka hanya sekedar mengetahui informasi keberadaan saja tetapi tidak tau persis prosedur untuk mendapatkan pinjaman tersebut (*asymmetric information*). Untuk kelurahan yang tidak terdapat KJKS BMT disana, umumnya mereka jarang mendapatkan informasi pembiayaan ini. Jika ada BPR yang berlokasi di kecamatan setempat umumnya mereka lebih memanfaatkan jasa lembaga keuangan terdekat.

b. Kemampuan membuat proposal pengajuan pinjaman (*the ability of respondent to complete application form without help*)

Merupakan tingkat kemampuan responden dalam membuat proposal pinjaman sesuai dengan standar proposal yang ditetapkan KJKS BMT.

Kemampuan membuat prosal pengajuan pinjaman diukur dengan skala Likert meng-

gunakan 3 indikator seperti disajikan dalam Tabel 6.

Proses melakukan pinjaman pada KJKS BMT sangat sederhana. Tidak mensyaratkan proposal kelayakan usaha serumit jika melakukan pinjaman ke bank profesional. Di KJKS BMT calon nasabah yang ingin melakukan pinjaman cukup mendatangi kantor KJKS BMT setempat dengan mengisi form permohonan dan melampirkan identitas diri (KTP dan Kartu Keluarga) disertai pas foto dan surat rekomendasi dari Lurah setempat. Tidak ada agunan yang disyaratkan oleh KJKS BMT (kecuali untuk pinjaman dalam nominal besar > Rp5 juta), tidak pula bunga pinjaman. Pinjaman dilakukan berdasarkan prinsip syariah, mereka tidak mengenal konsep bunga, hanya konsep berbagi hasil (saling berbagi resiko dan keuntungan). Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa 63% responden sudah mampu membuat proposal kelayakan usaha untuk pengajuan pinjaman ke BMT tanpa tenaga pendamping. Kemampuan ini mereka peroleh secara kolektif dari proses berbagi pengalaman dalam kelompok tani termasuk pengalaman dalam melakukan pinjaman. Sebanyak 37% responden masih perlu didampingi dalam membuat proposal kelayakan usaha. Dinamika ini dipengaruhi oleh karakteristik individu petani seperti

Tabel 7. Penilaian Indikator Volume Pinjaman Nasabah KJKS MBT (2012-2014)

Indikator	Penilaian Indikator	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Baik	Bila pinjaman yang diberikan sesuai dengan jumlah yang diajukan	25	83
Kurang Baik	Bila pinjaman yang diberikan kurang tapi mendekati jumlah yang diajukan	5	17
Tidak baik	Bila pinjaman yang diberikan kurang dari setengah nominal yang diajukan	0	0

Tabel 8. Realisasi Pencairan Pinjaman Nasabah KJKS BMT (2012-2014)

Indikator	Penilaian Indikator	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Baik	Bila pencairan pinjaman sesuai jumlah dan waktu kebutuhan (sesuai perilaku biaya usahatani)	25	83
Kurang Baik	Bila pencairan pinjaman sesuai jumlah tapi tidak tepat waktu atau sebaliknya	5	17
Tidak baik	Bila pencairan pinjaman tidak sesuai jumlah dan waktu kebutuhan	0	0

tingkat pendidikan dan pengalaman berusaha-tani. Responden yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan pengalaman berusaha-tani yang cukup, memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membuat analisa kelayakan usahatannya. Riset Dzadze *et al.* (2012) mengungkapkan bahwa 72% responden petani di Ghana mengetahui cara prosedur pinjaman ke Bank tetapi hanya 54% responden yang mampu menyiapkan proposal pengajuan kredit tanpa pinjaman.

c. Volume pagu pinjaman

Merupakan volume pinjaman yang dapat memenuhi kebutuhan biaya usahatani yang diusulkan pada form usulan ke KJKS BMT.

Berdasarkan Tabel 7 sebanyak 83% responden memperoleh pinjaman sesuai dengan nominal yang diajukan. Terdapat 17% nasabah yang memperoleh pinjaman tidak sesuai dengan yang diusulkan, namun tidak terlalu besar pengurangannya, (berkisar 15% - 25% dari jumlah yang diusulkan nasabah). Biasanya pihak BMT melakukan hal ini dengan pertimbangan riwayat pinjaman dan pengembalian nasabah tsb. Dzadze *et al.* (2012) mengungkapkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan bank dalam memberikan pinjaman adalah *farming experience* dan *account turnover*.

d. Realisasi pencairan pinjaman

Merupakan masa pencairan pinjaman yang disesuaikan dengan pola tanam.

Realisasi pencairan pinjaman nasabah dinilai baik, karena 83% nasabah merasakan bahwa pencairan pinjaman sudah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dan waktu pencairan pinjaman juga tidak terlalu lama (paling lama 1 minggu). Bila dilihat dari lamanya *idle time* pencairan dana secara rata-rata tidak lebih dari 1 (satu) minggu. Sebaran waktu tunggu pencairan pinjaman dapat dilihat pada Tabel 9

Pihak KJKS BMT sendiri tidak membutuhkan waktu lama untuk pencairan dana, karena pengawasan (*on the spot*) ke lapangan/lokasi usahatani tidak jauh dan mudah diakses keberadaannya dari informasi ketua kelompok tani saja atau informasi dari pak lurah/ ketua RT yang merekomendasikan pinjaman petani. Biasanya kunjungan ke lapangan (*on the spot*) dilakukan untuk nasabah pemula, sedangkan untuk nasabah yang sudah berulang kali melakukan pinjaman, kunjungan ke lapangan tidak dilakukan lagi, cukup berdasarkan informasi dari pemberi rekomendasi saja (ketua kelompok tani/pak lurah setempat)

Tabel 9. Waktu Tunggu Pencairan Pinjaman Nasabah (2012-2014)

No	Waktu tunggu (hari)	Jumlah nasabah (orang)	Persentase (%)
1	3 hari	3	10
2	4 hari	5	17
3	6 hari	1	3
4	7 hari	21	70

Tabel 10. Penilaian Indikator Waktu Pengembalian Pinjaman oleh Nasabah (2012-2014)

Indikator	Penilaian Indikator	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Baik	Bila pengembalian dilakukan setelah panen/ disesuaikan dengan perilaku panen tanaman	30	100
Kurang Baik	Bila pengembalian setelah panen tapi tidak disesuaikan dengan perilaku panen tanaman	0	0
Tidak baik	Bila pengembalian pinjaman rutin perbulan/ per minggu tanpa mempertimbangkan usia panen tanaman	0	0

e. Waktu pengembalian pinjaman

Pembayaran dilakukan setelah panen atau disesuaikan dengan perkiraan sumber pendapatan petani.

Dilihat dari waktu pengembalian pinjaman, seluruh responden mengatakan bahwa pengembalian pinjaman diberikan setelah panen dan disesuaikan dengan umur panen tanaman. KJKS BMT sendiri memberikan jadwal pengembalian yang cukup fleksibel (harian/mingguan/bulanan). Namun 87% nasabah lebih menyukai waktu pengembalian pinjaman secara bulanan, karena menurut mereka lebih efektif dan tidak harus terlalu sering ke BMT untuk membayar angsuran dibandingkan pola mingguan. Kadangkala mereka membayar angsuran lewat ketua kelompok tani atau ke lurah/ketua RT setempat yang memberikan rekomendasi saat mereka melakukan pinjaman ke BMT. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Dzadze *et al.* (2012) bahwa petani di Ghana lebih menyukai pembayaran secara bulanan mengingat bahwa pertanian mereka bersifat musiman dan sangat tergantung kepada alam. Hasil investigasi menunjukkan bahwa sebagian besar petani mengalami kesulitan membayar pinjaman terpaksa menggunakan tabungan untuk pembayaran atau dipinjam dari teman-

teman dan anggota keluarga untuk memenuhi jadwal pembayaran bulanan.

Sebanyak 13% petani memilih pengembalian pinjaman dalam mingguan. Pertimbangan mereka adalah untuk memudahkan penyisihan dana untuk angsuran, jika dibayar mingguan menjadi tidak terasa karena jumlah angsuran perminggu tidak terlalu besar dan tidak merasa memberatkan bagi petani, walaupun frekuensi pembayarannya menjadi lebih sering dibandingkan pembayaran secara bulanan.

f. Pendampingan dan Monitoring

Merupakan kegiatan yang dilakukan KJKS BMT dalam mengawasi dan mengontrol penggunaan pinjaman oleh petani. Pengukuran terhadap indikator pendampingan dan monitoring dilakukan dengan menggunakan skala Likert seperti pada Tabel 12.

Pendampingan dan monitoring yang dilakukan oleh KJKS BMT dinilai baik oleh 50% responden, dimana proses pendampingan dan monitoring dilakukan secara rutin oleh pendamping. Biasanya pihak pendamping berasal dari kelurahan setempat yang sudah dikenal baik oleh masyarakat sehingga proses monitoring bisa dilakukan

Tabel 11. Pola Pengembalian Pinjaman Nasabah KJKS BMT

No	Waktu tunggu (hari)	Jumlah nasabah (orang)	Persentase (%)
1	Per hari	0	0
2	Per minggu	4	13
3	Per 2 minggu	0	0
4	Per bulan	26	87

Tabel 12. Penilaian Indikator Pendampingan dan Monitoring Pinjaman

Indikator	Penilaian Indikator	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Baik	Bila pendampingan dan monitoring dilakukan secara rutin dan berkala	15	50
Kurang Baik	Bila pendampingan dan monitoring tidak dilakukan secara rutin dan berkala	15	50
Tidak baik	Bila pendampingan dan monitoring tidak pernah dilakukan	0	0

dengan cukup mudah. Masih dekatnya hubungan sosial masyarakat di pedesaan membuat proses pendampingan dan monitoring bisa dilakukan dengan suasana kekerabatan yang erat. Disamping itu kecilnya wilayah/ruang lingkup layanan KJKS BMT menjadi faktor yang mempermudah proses pendampingan dan monitoring dilakukan secara baik. Namun kadangkala pengurus terjebak dengan hubungan baik yang sudah terbina sehingga mengabaikan pengawasan dan monitoring terhadap nasabah tertentu. Hal ini justru memunculkan pembiayaan yang bermasalah

Dari keseluruhan indikator yang diamati, didapatkan rata-rata penilaian responden terhadap aksesibilitas pembiayaan usahatani oleh KJKS BMT adalah **baik**. Hal ini menandakan bahwa KJKS BMT telah diminati petani sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan yang bisa mereka manfaatkan. Dengan demikian diharapkan mampu mengatasi kesulitan permodalan petani dan mengentaskan kemiskinan di tingkat pedesaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sbb:

1. Meski eksistensi KJKS BMT ditengah masyarakat desa khususnya petani mulai diminati masyarakat dan bahkan mengalami pertumbuhan yang positif, namun untuk pembiayaan usahatani ternyata *credit share* yang diberikan KJKS BMT masih sangat kecil yakni hanya kurang dari 5%. Sektor perdagangan dan UKM masih menjadi prioritas terbesar

dari kredit yang dikucurkan BMT. Padahal tingkat pertumbuhan nasabah petaninya selama dua tahun terakhir mencapai 75%, angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasabah secara keseluruhan yakni sebesar 36%.

2. Bahwa aksesibilitas dan realisasi pembiayaan usahatani pada KJKS BMT secara keseluruhan dinilai sudah baik, kendati masih ada sejumlah indikator yang menunjukkan hasil yang belum baik seperti ketersediaan informasi, volume pinjaman, serta monitoring dan pengawasan.

SARAN

Beberapa hal yang dapat disarankan dari penelitian ini adalah:

1. Pihak BMT hendaknya dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan *share credit* bagi pembiayaan usahatani di masa yang akan datang mengingat pertumbuhan nasabah petani yang tinggi mencapai 75%.
2. Untuk meningkatkan aksesibilitas dan realisasi pinjaman yang lebih baik, disarankan agar BMT memberikan informasi yang cukup atas jenis pembiayaan yang disediakan. Minimnya pengetahuan masyarakat akan prosedur pembiayaan yang berlandaskan syariah, serta sistem berbagi keuntungan dan resiko sebagai pengganti bunga adalah prioritas informasi yang harus disosialisasikan dengan baik untuk perkembangan BMT kedepan.
3. Paradoks kepercayaan dan hubungan sosial yang erat antara pengurus dengan anggota jangan sampai menjadi pe-

nyebab pembiayaan bermasalah karena kurangnya pengawasan dan monitoring. Sehingga persepsi masyarakat terhadap sebuah lembaga keuangan berlandaskan syariah yang otomatis bebas dari pembiayaan bermasalah bisa dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang, B, T. Sipilainen, T., Backman, S., Kola, J., (2015). Factors influencing smallholder farmers' access to agricultural microcredit in Northern Ghana. *African Journal of Agricultural Research*. Vol 10 (24) pp 2460-2469.
- Dzadze, P., Osei, M., Aidoo, R., Nurah., (2012). Factors determining access to formal credit in Ghana: A case study of smallholder farmers in the Abura-Asebu Kwamankese district of central region of Ghana. *Journal of Development and Agricultural Economics* Vol. 4(14), pp. 416-423, December 2012
- Husein H (2007). *Farm Household Economic Behaviour in Imperfect Financial Markets*. Uppsala : Swedish University of Agricultural Sciences, Doctorial Thesis. Accessed from <http://pub.epsilon.slu.se/1563/1/HH/Kfin0.pdf> on March 20, 2011.
- Isminiyati. (2004). Eksistensi BMT (baitul maal wat tamwil) sebagai lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Nomor 4 Oktober 2004 Halaman 71 - 84
- Kostov, P., Arun, T., Annim, S. (2015). Access to financial services: The case of the 'Mzansi' account in South Africa. *Review of Development Finance* 5 (2015) 34-42
- Nikaido, Y., Jesim, P., Mandira, S. (2015) What hinders and what enhances small enterprises' access to formal credit in India? *Review on Development Finance* 5 (2015) 43-52
- Nouman M, Siddiqi MF, Asim SM, Hussain Z (2013). Impact of Socioeconomic Characteristics of Farmers on Access to Agricultural Credit. *Sarhad Journal Agric*. 29(3):469-476
- Nikaido, Y., Pais, J., Sarma, M., (2015). What hinders and what enhances small enterprises' access to formal credit in India?. *Review of Development Finance* 5 (2015) 43-52
- Owuor G (2009). Can Group Based Credit Uphold Smallholder Farmers Productivity and Reduce Poverty in Africa? Empirical Evidence from Kenya. *Canterbury : EAAE-IAAE Seminar, University of Kent*
- Paxton J, Graham D, Thraen C (2000). Modeling Group Loan Repayment Behaviour: New Insights from Burkina Faso. *Econ. Dev. Cultural Change* 48(3):639-655
- Payne.S., Mc Creddie M.. (2010) *Evolving Grounded Theory Methodology : Toward a Discursive Approach*. *Int J Nurs Stud*. 2010 Jun; 47 (6): 781-93 doi:10.1016/j.ijnurstu.2009.11.006.Epub 2009 des/4
- Rachmad Handayana, Sjahrul Bustaman, (2007). *Fenomena Lembaga Keuangan Mikro Dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Bogor.
- Sudaryanto, T. dan M. Syukur. (2000). *Pengembangan Lembaga Keuangan Alternatif Mendukung Pembanguna Ekonomi Pedesaan*. Mimeo. Puslitbang Sosek Pertanian, Badan Litbang Pertanian.
- Yunus, M. (1981). *Credit for Self-Employment: A. Fundamental Human Right*. Grameen Bank, Bangladesh.
- Yehuala, S. (2008). *Determinants of smallholder farmers' access to formal credit: the case of Metema Woreda, North Gondar, Ethiopia*. North Gondar: MSc. Thesis: Haramaya University